

**ANALISA EKONOMI MAKRO
DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

ABSTRACT

Ahmad Yunani ; *Analisis Ekonomi Makro Dasar Kebijakan Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor yang tumbuh secara cepat dan memiliki kontribusi terbesar pada PDRB, mengetahui kondisi makro ekonomi setiap kecamatan di dan mengetahui arah kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Pengembangan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode analisa yang digunakan adalah metode analisa *shift share*, *Location Quotien* dan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan telah terjadi ada titik jenuh dalam inovasi produk, sumber daya manusia yang bergerak disektor industri masih rendah. Sektor yang menarik untuk dicermati adalah sektor kontruksi, sektor ini memiliki perkembangan cukup pesat di daerah ini namun masih belum berdaya saing. Sektor ini terlihat perkembangannya karena sektor ini membuka luasan kota ke arah pinggiran yang menyediakan lahan perumahan dan kontruksi yang lebih luas karena selama ini pembangunan pada sektor kontruksi agak lambat dibandingkan Kabupaten lainnya di Banua Enam seperti dengan Kabupaten HST dan Tabalong. Perkembangan yang sangat pesat pada sektor keuangan, hal ini menggambarkan perekonomian daerah ini sangat dinamis dan bergerak dengan baik sebab peredaran uang cukup tinggi yang diiringi dengan perkembangan sektor jasa yang positif, sehingga hanya sektor keuangan yang dapat memberikan efek kontribusi terhadap perekonomian provinsi Kalimantan Selatan. Yang menarik di kabupaten HSU ternyata semua sektor mengalami kenaikan aktual yang cukup merata semua sektor dan yang tertinggi sektor keuangan dan pertanian. Kenaikan aktual merupakan pertumbuhan kontribusi sector ini terhadap perekonomian daerah yang paling tinggi adalah sektor Lembaga Keuangan sebesar 13,46 %, sektor Pertanian 11,79 %, sektor Kontruksi 10,14 %, sektor Jasa-jasa sebesar 10 % kemudian disusul sektor Listrik dan Air 9,49 %, sektor pengangkutan 9,45 %, sektor %, sektor perdagangan 8,15 %, sektor pertambangan 6,59 %, sektor industri 4,21 %. Dari sumbangan persentase perubahan PDRB yang disebabkan pangsa wilayah/*Regional Share Growth* (RSG) yang bernilai positif yang berarti memiliki keunggulan daya saing adalah Sektor Pertanian (0,17 %), Sektor Listrik, Gas dan Air (0,94 %). Pertumbuhan yang terjadi lebih banyak disebabkan komponen perubahan pertumbuhan propinsi, walaupun secara efek bersih/*Pergeseran Bersih* (PB) Wilayah Hulu Sungai Utara yang bernilai positif hanya sektor keuangan yaitu 0,02 % yang berarti sektor ini mampu berkontribusi terhadap PDRB Propinsi dan perkembangan wilayah. *Pergeseran Bersih* (PB) yang bernilai negatif seperti se %, industri 9,20 %, listrik, gas dan air 3,96 %, kontruksi 3,31 %, perdagangan 5,29 % angkutan 3,99 %, dan jasa 3,44 % yang berarti Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan supply (input) dari daerah lain di Kalimantan Selatan. Sektor ekonomi yang memiliki *Industrial Mix Growth* (IMG) positif menunjukkan sektor ekonomi yang berkembang pesat, diantaranya sektor Pertambangan (4,61 %), Kontruksi (2,33 %), Keuangan (9,54 %) dan Jasa (0,1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang diselenggarakan, dipengaruhi oleh perbedaan potensi dan keunggulan komparatif setiap wilayah, sehingga ada keterbatasan antar wilayah dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan, khususnya pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu pula dalam hubungannya dengan pergeseran struktur ekonomi dan pergeseran pertumbuhan kesempatan kerja per sektor ekonomi setiap kabupaten /kota. Dengan diberlakukannya secara efektif UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di daerah (Otonomi Daerah) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan modal dasar bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merancang dan membangun tatanannya sesuai dengan karakteristik daerah untuk mengelola potensi dan segala sumber daya yang dimiliki dengan tujuan terwujudnya pembangunan daerah yang tangguh dan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pembangunan adalah suatu mekanisme penggunaan sumber daya yang terbatas dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam, teknologi, manusia, dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang suatu perekonomian melalui mekanisme ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan baik swasta maupun publik agar memperoleh peningkatan taraf hidup dan kemiskinan. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu tertentu sebagai tahun dasar.

Secara makro, perkembangan sosial ekonomi yang membaik pada salah satu bidang atau sektor tertentu harus ditempatkan pada konteks sosial perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi misalnya, tanpa memperhatikan masalah pemerataan dan perluasan kesempatan kerja bukanlah perkembangan yang baik dari sudut pandang makro. Pendekatan ekspor dan pendapatan tanpa melihat laju inflasi yang tinggi juga bukan perkembangan yang baik dari sudut pandang makro. Jadi arah kemakmuran yang dituju adalah kemakmuran semua pihak dengan melibatkan lebih dari satu indikator sosial ekonomi sebagai pegangan kajian.

Persoalannya, kesejahteraan secara ekonomi abstrak sekali sifatnya sehingga perlu dijabarkan dan didekati dengan ukuran-ukuran tertentu, perlu dibuktikan dengan indikator-indikator tertentu sehingga menjadi konkrit. Oleh karena itu publikasi ini mengupas berbagai indikator sosial ekonomi secara makro dengan studi analisis sosial ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Indikator sosial ekonomi berdasarkan pendekatan makro sangat diperlukan untuk mengukur atau paling tidak mengamati kegiatan perkembangan kegiatan sosial ekonomi nasional maupun daerah melalui trend tertentu. Dengan demikian indikator dapat mendukung kajian masalah secara empiris. Tentu saja indikator ini bukan satu-satunya faktor yang dapat dipercaya penuh dalam mengamati suatu perkembangan sosial ekonomi daerah, karena studi sosial ekonomi pada dasarnya adalah studi tentang tingkah laku manusia yang tidak jarang melibatkan faktor-faktor di luar masalah sosial ekonomi.

Pendekatan sosial ekonomi secara makro berarti melibatkan bidang-bidang sosial ekonomi seperti struktur produksi, pendapatan regional, keuangan daerah (APBD), sumber daya manusia, ketenagakerjaan, pemerataan dan kemiskinan. Semua bidang saling terkait satu sama lain, sehingga kajian permasalahan hendaknya tidak hanya menggunakan satu indikator saja.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan, dipengaruhi oleh perbedaan potensi dan keunggulan komparatif setiap wilayah, sehingga ada keterbatasan antar wilayah dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan, khususnya pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu pula dalam hubungannya dengan pergeseran struktur ekonomi dan pergeseran pertumbuhan kesempatan kerja per sektor ekonomi setiap kabupaten/kota. Jika akan membangun suatu daerah kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara masih didominasi oleh sektor Pertanian dan sektor jasa-jasa. Kondisi ini dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor pada PDRB Kab. HSU selama 3 tahun terakhir seperti pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1.
Distribusi PDRB (Struktur Ekonomi) Kab. Hulu Sungai Utara (Harga Konstan) 2006-2008

No.	Sektor/Lapangan Kerja	2006	2007	2008
1	Pertanian	30.38	30.81	30.28
2	Pertambangan dan Penggalian	0.02	0.02	0.02
3	Industri Pengolahan	10.97	10.32	9.81
4	Listrik dan Air Bersih	0.57	0.57	56
5	Bangunan/Konstruksi	6.85	6.76	6.83
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	18.76	18.49	17.97
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7.57	8.01	8.03
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.16	4.2	4.52
9	Jasa-jasa	20.74	20.8	22.02

Sumber : PDRB Kab. HSU, BPS, 2009

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sektor-sektor yang tumbuh secara cepat dan memiliki kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Mengetahui kondisi makro ekonomi setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Mengetahui arah kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Pengembangan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.3. Manfaat

Manfaat penelitian adalah :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dokumen Master Plan Pengembangan Ekonomi.
2. Memberikan gambaran tentang sektor-sektor yang secara cepat berkembang, arah dan konsentrasi sektor pembangunan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu tertentu sebagai tahun dasar.

Dalam perhitungan PDRB, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan berikut ini :

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) nilai tambah merupakan hasil pengurangan output dengan input antara. Unit produksi tersebut disajikan dalam 9 kelompok lapangan usaha : 1). Pertanian, 2). Pertambangan dan penggalian, 3). Industri Pengolahan, 4). Listrik Gas dan Air, 5). Bangunan, 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7). Pengangkutan dan Komunikasi, 8). Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan 9). Jasa-jasa, termasuk pelayanan pemerintah.

$$PDRB = Output = Produksi (tahun t) \times Harga (tahun t)$$

atau

$$NTB = Output (harga berlaku tahun t) \times ratio NTB (tahun dasar)$$

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah barang dan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi berupa gaji dan upah, sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan) semua sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi)

$$PDRB = Gaji/upah + Surplus usaha + Penyusutan + Pajak tak langsung neto$$

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- 1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba,
- 2). Konsumsi pemerintah,
- 3). Pembentukan modal domestik bruto,
- 4). Perubahan stok dan
- 5). Ekspor neto (X-M)

$$PDRB = Konsumsi RT + Konsumsi Pemerintah + PMDB + perubahan stok + (X-M)$$

Semua permintaan akhir (Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal domestik bruto, perubahan stock, ekspor neto)

4. Indikator Ekonomi Makro

Perencanaan pembangunan ekonomi harus terintegrasi antar sektor dengan tolak ukur :

- Pertumbuhan ekonomi / *economic growth*
- Penyerapan tenaga kerja / *employment*
- Inflasi / *inflation*

5. Struktur Ekonomi

Perubahan struktur perekonomian merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi. Kontribusi sektoral PDRB dapat dilihat dari pangsa sektor terhadap PDRB.

$$S (\text{sektor } i) = \frac{\text{PDRB (sektor } i)}{\sum \text{PDRB}}$$

Kontribusi sektoral sering dikaitkan dengan perubahan konsentrasi kegiatan ekonomi daerah (Rostow) tentang tahap pertumbuhan ekonomi:

1. Fase tradisional (*the traditional society*)
2. Fase pra kondisi (*pra condition for take off into sustaining growth*)
3. Fase tinggal landas (*take off*)
4. Fase dorongan ke arah kedewasaan (*the drive to maturity*)
5. Fase tingkat konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*)

2.2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai Pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul ketika terjadi 'kegagalan' pembangunan, dimana proses yang terjadi bersifat top-down (arus informasi yang terjadi hanya satu arah dari atas ke bawah) dan jika ditinjau dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi proses pembangunan yang terjadi ternyata tidak berkelanjutan. Pelaksanaan konsep ini diperkuat lagi dengan kesepakatan para pemimpin bangsa yang dinyatakan dalam hasil-hasil negosiasi internasional, antara lain Deklarasi Rio pada KTT Bumi tahun 1992, Deklarasi Milenium PBB tahun 2000, dan Deklarasi Johannesburg pada KTT Bumi tahun 2002.

Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana, sehingga sumber daya alam terbarukan dapat dilindungi dan penggunaan sumber alam yang dapat habis (tidak terbarukan) pada tingkat dimana kebutuhan generasi mendatang tetap akan terpenuhi.

Clean Development Mechanism (CDM) sangat berkaitan erat dengan masalah pembangunan berkelanjutan karena tujuan utama dari CDM selain untuk membantu negara maju menurunkan emisi gas rumah kacanya, adalah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, seperti yang tercantum dalam artikel 12 Protokol Kyoto. Bagaimana caranya agar CDM bisa mendukung pembangunan berkelanjutan? Tentu saja proyek-proyek CDM harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih memudahkan dalam membuat penilaian pada suatu proyek apakah proyek tersebut mendukung pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan sebuah kriteria pembangunan berkelanjutan. Kriteria pembangunan berkelanjutan harus mengacu pada empat aspek umum pembangunan yaitu aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan teknologi. Sebuah inisiatif negara-negara selatan dan negara utara dalam sebuah kerja sama aplikasi CDM menghasilkan sebuah kriteria dan indikator untuk menilai kontribusi proyek CDM terhadap pembangunan berkelanjutan. Metode SSN ini melihat pembangunan berkelanjutan dari empat sisi yaitu, sosial, ekonomi, lingkungan dan teknologi dan tercermin dalam indikator-indikator berikut ini:

- Kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan lokal
- Kontribusi terhadap keberlanjutan penggunaan sumberdaya alam
- Kontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja
- Kontribusi terhadap keberlanjutan neraca pembayaran
- Kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi makro
- Efektifitas biaya
- Kontribusi terhadap kemandirian teknis

Metode SSN memberikan cara sederhana untuk mengukur indikator ini dalam bentuk matriks. Selain itu, hal yang harus dipertimbangkan dalam hal kelayakan proyek adalah pemenuhan indikator kriteria lingkungan dan sosial – yang berarti harus bernilai positif. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka proyek yang bersangkutan tidak berkelanjutan dan tidak memberikan kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan. Lengkapnya bisa dilihat di tabel berikut ini:

Proyek CDM harus mendukung pembangunan berkelanjutan di negara penyelenggara proyek CDM. Negara penyelenggara yang akan memiliki tanggung jawab untuk menganalisa apakah proyek CDM dapat memenuhi persyaratan dalam Protokol Kyoto dalam hal pembangunan berkelanjutan.

Dalam negosiasi internasional, negara berkembang menuntut agar penentuan kriteria pembangunan berkelanjutan sebagai isu kedaulatan negara, dan tidak dapat didikte oleh siapapun. Jadi, penilaian syarat pembangunan berkelanjutan diserahkan kepada masing-masing negara penyelenggara CDM.

CDM mensyaratkan negara penyelenggara membentuk suatu institusi nasional yang memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan kepada proyek CDM berdasarkan pada kontribusi proyek tersebut kepada pembangunan. Institusi nasional ini biasa disebut dengan Designated National Authority (DNA).

Untuk memudahkan DNA menilai dan juga memudahkan pengembang proyek dalam mengajukan proposal ke DNA, maka suatu kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan. Karena kriteria ini diserahkan kepada masing-masing negara penyelenggara CDM, kriteria di masing-masing negara tentunya akan berbeda-beda, sangat *country-specific*.

Karena DNA belum terbentuk di Indonesia, belum ada peraturan yang jelas mengenai kriteria pembangunan berkelanjutan yang seperti apa yang akan digunakan oleh DNA. Namun untuk CDM sektor energi, saat ini sebuah working group yang berada di bawah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sedang mempersiapkan kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan bagi proyek CDM di sektor energi. Kriteria ini diharapkan bisa secepatnya disahkan melalui sebuah Keputusan Menteri dan bisa menjadi masukan bagi pembentukan kriteria pembangunan proyek CDM secara nasional.

Dalam peraturan CDM sendiri, selain proses persetujuan dari negara tuan rumah CDM, ada dua hal lain yang digunakan untuk melihat kaitan antara CDM dan pembangunan berkelanjutan, yaitu analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan partisipasi publik. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam melakukan partisipasi publik adalah AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan). Amdal adalah sebuah proses perencanaan yang digunakan untuk memprediksi, menganalisa dan mengartikan dampak nyata dari sebuah proposal atau rencana pembangunan terhadap lingkungan serta untuk menyediakan informasi yang bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan apakah proposal tersebut akan disetujui atau tidak.

2.3. Location Quotients (LQ)

Teknik ini membantu kita untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat self-sufficiency suatu sektor. Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

1. Kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industri basis.
2. Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut, jenis ini dinamakan industri non basis atau industri lokal.

Dasar pemikiran teknik ini adalah teori *economic base* yang intinya adalah: karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor industry local merupakan investasi yang mendorong (*induced*) sebagai akibat dari kenaikan industri basis.

Oleh karena itu, industri basislah yang patut di kembangkan di suatu daerah. Tugas pertama yang harus kita lakukan adalah menggolongkan setiap industri apakah termasuk industri basic atau non basic. Untuk keperluan ini dipakai Location Quotient (LQ), yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Rumus menghitung LQ adalah :

$$LQ = \frac{V_i^* V_t^* / V_i^* V_i^*}{V_i V_t / V_t V_t}$$

V_i^* adalah pendapatan dari industri di suatu daerah i.

V_t^* adalah pendapatan total daerah i.

V_i adalah pendapatan dari industri sejenis secara regional / nasional.

V_t adalah pendapatan regional / nasional.

Asumsi teknik ini adalah: semua penduduk di semua daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional (pola pengeluaran secara geografis sama), produktivitas tenaga kerja sama, dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor.

Bagaimana menginterpretasikan angka LQ? Andai kata penduduk suatu daerah dapat memenuhi kebutuhannya akan suatu barang dengan hasil industri sendiri, berarti peranan relatif industri yang bersangkutan dalam daerah adalah sama dengan peran relatif industri sejenis dalam perekonomian nasional. Berarti juga bahwa LQ di daerah industri A adalah 1 (satu) berarti daerah tersebut dapat “mengekspor” hasil industri tekstil ke daerah lain. Misalnya LQ 1.5 atau $3/2$ artinya $1/3$ hasil industri dapat “diekspor”, sedang $2/3$ dikonsumsi daerah yang bersangkutan.

Penggunaan LQ sangat sederhana, serta dapat dipakai untuk menganalisis tentang “ekspor-impor” (perdagangan) suatu daerah. Namun teknik ini mempunyai kelemahan, yaitu:

1. Selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat adalah berlainan baik antara daerah maupun dalam suatu daerah.
2. Tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang, untuk setiap daerah berbeda, artinya konsumsi rata-rata bahan pakaian daerah A lebih besar dari 1 (satu) tetapi daerah A “mengimpor” bahan pakaian, sedang daerah B yang LQ industri bahan pakaian lebih kecil dari 1 (satu) namun dapat “mengekspor” bahan pakaian.
3. Bahan keperluan industri berbeda antara daerah. Artinya daerah A memakai benang tenun dari kapas, sedang daerah B lebih banyak memakai bahan tenun sintetis. Walaupun industri pemintalan kapas daerah A mempunyai LQ lebih besar dari 1 (satu), daerah itu mungkin harus mengimpor bahan tenun dari daerah B yang mungkin industri tekstil di daerah B mempunyai LQ kurang dari 1 (satu).

BAB III METODE PENDEKATAN

3.1. Lingkup Kawasan Kajian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan, dimana objek yang diteliti adalah sektor-sektor PDRB dengan membahas tingkat daya saing dan kontribusinya terhadap PDRB.

3.2. Lingkup Kegiatan

Penelitian tentang kajian Kerangka Makro Ekonomi Daerah Kab. Hulu Sungai Utara dalam rangka memberikan gambaran tentang arah pembangunan ekonomi daerah ini direncanakan terbagai dalam 4 (empat) tahapan pekerjaan yaitu:

1) Tahap Persiapan, antara lain

- a. Pengurusan ijin
- b. Telaah pustaka
- c. Pengumpulan data sekunder
- d. Pengumpulan data primer
- e. Pembuatan daftar pertanyaan

2) Tahap Pengumpulan Data

- a. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dipublikasikan yang meliputi data indikator ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Propinsi Kalimantan Selatan serta data yang berasal dari berbagai instansi terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten HSU dan Propinsi Kalimantan Selatan. Dilengkapi dengan data primer melalui *indept interview* (wawancara mendalam) dengan berbagai sumber terkait.
- b. Melakukan *indept interview* terhadap instansi terkait untuk mengkaji permasalahan dan hambatan serta langkah strategi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

3) Tahap Analisis

1. Analisa Shift Share

Metode analisa yang digunakan adalah metode analisa *shift share*, secara matematik mekanisme kerja dari ketiga komponen pertumbuhan akan menimbulkan perubahan sebagai berikut :

Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini terdiri dari sembilan sektor ekonomi (l = 1, 2, 3 ... 9) maka secara matematik mekanisme kerja dari ketiga komponen pertumbuhan akan menimbulkan perubahan, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \Delta Y_{ij} &= \text{NG}_{ij} + \text{IMG}_{ij} + \text{RSG}_{ij} \\ Y'_{ij} - Y_{ij} &= \Delta Y_{ij} \\ &= Y_{ij} \left(\sum \text{Ra}-1 \right) + Y_{ij} (\text{Ri}- \sum \text{Ra}) + Y_{ij} (\text{ri} - \text{Ri}), \end{aligned}$$

dimana :

- | | | |
|-------------------------|------------------|--|
| ΔY_{ij} | = | Perubahan dalam produksi sektor i pada pada Kabupaten ke j. |
| Y_{ij} | = | Produksi dari sektor i pada kabupaten ke j, dalam tahun dasar analisis |
| Y'_{ij} | = | Produksi dari sektor l pada ke j, dalam tahun akhir analisis |
| $r_1 = Y'_{ij}/Y_{ij}$ | $R_i = Y'_i/Y_i$ | $R_a = Y'.. / Y..$ |
| $(r_1 - 1)$ | = | persentasi perubahan PDRB pada sektor i, Kabupaten ke j |
| $(\text{Ra}-1)$ | = | persentasi perubahan PDRB disebabkan komponen pertumbuhan propinsi. |
| $(\text{Ri}-\text{Ra})$ | = | IMG_{ij} = persentasi perubahan PDRB disebabkan komponen pertumbuhan proporsional. |
| $(\text{ri}-\text{Ri})$ | = | RSG_{ij} = persentasi perubahan PDRB disebabkan oleh komponen pertumbuhan pangsa wilayah. |

Apabila $IMG_{ij} > 0$, menunjukkan bahwa sektor i di tingkat wilayah kabupaten pertumbuhannya pesat, dan sebaliknya, jika $IMG_{ij} < 0$, maka pertumbuhannya lamban atau sektor ekonomi yang kurang berkembang.

Apabila $RSG_{ij} > 0$, menunjukkan bahwa sektor wilayah tersebut (j) mempunyai daya saing yang kuat dibanding dengan wilayah lainnya untuk sektor ke i propinsi (sebagai acuan).

Dan Apabila besaran $NG/PB_{ij} > 0$, maka pertumbuhan sektor i di tingkat wilayah j termasuk dalam kelompok progresif, dan demikian pula sebaliknya. Apabila $PB_j > 0$, maka pertumbuhan wilayah tersebut termasuk dalam kelompok progresif, atau merupakan penambah PDRB propinsi.

2. Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk melihat konsentrasi antar sektor ekonomi dan melakukan perbandingan antar sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan baik dari sisi *comparative advantage* ataupun *competitive advantage* yang memungkinkan untuk dikembangkan dan sesuai dengan kondisi daerah.

3. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif dilakukan untuk mengutip dan menguraikan data-data sekunder dari berbagai hasil publikasi dan penelitian dibidang ini dan data primer hasil wawancara.

4. Analisis Ekonomi dan Sektor Unggulan

Yaitu untuk mewujudkan ekonomi wilayah yang *sustained* melalui keterkaitan ekonomi lokal dalam sistem ekonomi wilayah yang lebih luas (regional, nasional dan internasional). Penguatan ekonomi wilayah diarahkan untuk menciptakan keterkaitan intra-regional (antar kawasan/kabupaten/kota) dan inter-regional (antar wilayah) berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), income per kapita, besaran APBD, jumlah dan besarnya investasi pemerintah dan swasta, jumlah tenaga kerja di sektor formal, jumlah pengangguran, jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara.

Berdasarkan penguatan ekonomi wilayah ini akan diperoleh gambaran karakteristik perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ciri-ciri ekonomi kawasan dengan mengidentifikasi wilayah basis ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sektor-sektor unggulan, besaran kesempatan kerja, pertumbuhan dan disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten / kota di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Pengembangan potensi ekonomi dapat melalui sinergis pengembangan komoditas unggulan dan pola kemitraan antar daerah sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi. Selain itu juga perlunya upaya-upaya mengurangi kesenjangan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi antar wilayah, antar sektor dan antar penduduk dan terjadinya peningkatan distribusi pendapatan masyarakat.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Sektor Ekonomi yang Tumbuh secara Cepat dan Memiliki Kontribusi Terhadap PDRB

Analisis Master Plan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah ini di kawasan regional. Struktur pertumbuhan ekonomi daerah memberikan gambaran tendensi pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

Tabel 4.1. menampilkan data riel PDRB dan ratio PDRB per sektor ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang digunakan untuk melihat tingkat kesenjangan PDRB dengan menggunakan analisis shift share.

Tabel 4.1.
PDRB dan Ratio PDRB Kab. HSU dalam Propinsi Kalimantan Selatan
(Dalam Ribuan Rupiah)

Sektor	PDRB Kab.HSU		PDRB Kalsel		Ratio	Ratio	PDRB
	2006	2008	2006	2008	HSU	Kal Sel	Agregat
	(E _{ij})	(E' _{ij})	(E _i)	(E' _i)	(r _i)	(R _i)	(R _a)
1. Pertanian	230,056,136	257,180,204	5,956,280,817	6,648,381,847.40	1.12	1.12	1.13

2. Pertambgn & Penggalian	145,518	155,102	5,167,491,133	6,100,514,817.10	1.07	1.18	1.13
3. Industri Pengolahan	76,822,553	80,055,090	2,842,228,118	3,073,856,179.08	1.04	1.08	1.13
4. Listrik, Gas, dan Air	3,813,626	4,175,393	126,228,575	137,011,641.43	1.09	1.09	1.13
5. Konstruksi	43,656,566	48,081,208	1,307,144,199	1,513,408,967.73	1.10	1.16	1.13
6. Perdagangan	139,886,105	151,288,577	3,708,359,987	4,172,594,046.94	1.08	1.13	1.13
7. Angkutan/Transportasi	50,435,146	55,202,391	2,142,707,022	2,374,332,444.29	1.09	1.11	1.13
8. Lembaga Keuangan	27,968,094	31,733,174	885,869,474	1,089,507,546.93	1.13	1.23	1.13
9. Jasa-jasa	128,172,877	140,994,963	2,138,307,858	2,428,844,003.87	1.10	1.14	1.13
Jumlah	700,956,621	768,866,102	24,274,617,183	27,538,451,495	1.10	1.13	
Sumber :Kabupaten HSU dalam Angka Tahun 2009, BPS Kabupaten HSU							

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, perkembangan sektor – sektor ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan perkembangan yang positif yang berarti sektor ekonomi ini dalam kurun waktu 3 tahun mengalami pergerakan dengan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kontribusi ini selain nampak secara angka riil maupun secara persentase menggambarkan bahwa pembangunan di daerah ini cukup berhasil. Rata-rata pertumbuhan seluruh sector Kabupaten Hulu Sungai Utara 1,10 % di bawah perkembangan rata-rata pertumbuhan seluruh sektor Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 1,13%. Rata-rata pertumbuhan yang dibawah Provinsi Kalimantan Selatan ini memberikan gambaran bahwa perekonomian HSU masih dibawah pertumbuhan Provinsi ini mencerminkan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan ditingkatkan misalnya melalui rangsangan investasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sektor ekonomi yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi adalah sektor lembaga keuangan (1,13 %) dan sektor pertanian (1.12%) sedangkan yang paling rendah sektor Industri (1,04%).

Tabel 4.2.
Komponen Perubahan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 dan 2006

Sektor	PDRB HSU	NG (Ra-1)	IMG (Ri-Ra)	RSG (ri-Ri)	Effek Bersih	Kenaikan Aktual	Rangking
1. Pertanian	11.79	13.45	(1.83)	0.17	(1.66)	11.79	2
2. Pertambangan & Penggalian	6.59	13.45	4.61	(11.47)	(6.86)	6.59	8
3. Industri Pengolahan	4.21	13.45	(5.30)	(3.94)	(9.24)	4.21	9
4. Listrik, Gas, dan Air	9.49	13.45	(4.90)	0.94	(3.96)	9.49	5
5. Kontruksi	10.14	13.45	2.33	(5.64)	(3.31)	10.14	3
6. Perdagangan	8.15	13.45	(0.93)	(4.37)	(5.29)	8.15	7
7. Angkutan/Transportasi	9.45	13.45	(2.64)	(1.36)	(3.99)	9.45	6
8. Lembaga Keuangan	13.46	13.45	9.54	(9.53)	0.02	13.46	1
9. Jasa-jasa	10.00	13.45	0.14	(3.58)	(3.44)	10.00	4

Rendahnya perkembangan sektor industri dipicu oleh keterbatasan bahan baku, secara tabel input output bahan baku industri kerajinan di kabupaten HSU berasal dari luar daerah sebagai kawasan sekitar. Berdasarkan perhitungan instrumen analisis shift share, diperlihatkan sektor-sektor yang memiliki keunggulan, daya saing, dan yang memberikan kontribusi pertumbuhan baik bagi kabupaten maupun bagi pertumbuhan propinsi, dapat diperhatikan tabel 4.2.

Nilai national growth effect (NG) 13,45 menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Selatan yang mempengaruhi pertumbuhan kabupaten HSU. Pergeseran proporsional (proporsional shift) berupa industri mix growth (IMG) menunjukkan perubahan relative sektor kinerja mengalami kenaikan adalah sektor lembaga keuangan (9,54), pertambangan/galian 4.61, kontruksi 2,33 dan jasa-jasa 0,14. Pergeseran diferensial (differential shift) yang menunjukkan kekompakan sektor pertanian

dan sektor listrik, gas dan air dibandingkan dengan sektor lainnya pada tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Dampak nyata (Efek Bersih) pertumbuhan ekonomi daerah ternyata hanya disumbang oleh sektor lembaga keuangan sebesar 0,02 %, sedangkan sektor yang meningkat nilai kompetitifnya adalah sektor pertanian 0,17 dan sektor listrik, gas dan air (0,94). Sedangkan yang menurun daya kompetitifnya adalah sektor pertambangan, industri, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa. Output yang dihasilkan melalui bauran industri (industri mix) sebagai hasil interaksi antar kegiatan industri yang saling berkaitan. Nasional growth effect yang merupakan pengaruh pertumbuhan ekonomi Kalsel terhadap pertumbuhan ekonomi di HSU dalam hal ini hanya sektor Lembaga Keuangan 0.02. Aspek negative (Nasional growth effect) perubahan relative rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi kabupaten HSU dibawah pertumbuhan ekonomi provinsi Kalsel. Perkembangan sektor ekonomi tertinggi pada sektor lembaga keuangan, pertanian, konstruksi dan jasa sedangkan sektor lainnya perkembangannya lebih lambat.

1. Kenaikan Aktual (Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Perekonomian Daerah)

Kenaikan aktual merupakan pertumbuhan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah yang paling tinggi adalah sektor Lembaga Keuangan sebesar 13,46 %, sektor Pertanian 11,79 %, sektor Konstruksi 10,14 %, sektor Jasa-jasa sebesar 10 % kemudian disusul sektor Listrik dan Air 9,49 %, sektor pengangkutan 9,45 %, sektor %, sektor perdagangan 8,15 %, sektor pertambangan 6,59 %, sektor industri 4,21 %. Menarik untuk dianalisa adalah sektor yang terbesar dalam menyumbang kenaikan aktual PDRB yaitu sektor Lembaga Keuangan dan sektor Pertanian sektor yang memiliki kenaikan aktual terkecil yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sedangkan yang mengalami penurunan adalah sektor Pertambangan dan Penggalian mencapai 10,76 %. Sektor Lembaga Keuangan yang menyumbang kenaikan aktual PDRB tertinggi sebesar 75,63 % menunjukkan peredaran uang yang cukup tinggi didaerah ini dan perkembangan ekonomi berjalan cukup baik dengan meningkatnya penggunaan jasa lembaga keuangan dan perbankan. Besaran perkembangan kontribusi terhadap PDRB Tahun 2008 sebesar Rp. 768.817.102,- naik dari tahun 2006 hanya Rp. 700.956,-. Demikian pula sektor jasa yang mengalami pertumbuhan aktual terbesar kedua yaitu sebesar 10 % dengan besaran rupiahnya pada tahun 2006 sebesar Rp. 128.172.877,- menjadi Rp 2.138.844,29 tahun 2008.

Hal ini merupakan fenomena menarik dan sangat menggembirakan karena sektor lembaga keuangan dan sektor pertanian yang berarti dalam kurun waktu yang cukup singkat berkembang pesat, sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan dan dalam pengembangannya memiliki resiko yang kecil dan investasinya pun tidak terlalu besar dan tentunya yang penting adalah multiplier terhadap perekonomian dan peningkatan PAD sangat baik. Disisi lain pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara harus melakukan evaluasi dalam pengembangan sektor industri pengolahan dan penyusunan strategi yang efektif pada masa yang akan datang karena sektor ini banyak menyerap tenaga kerja. Sektor Pertanian berkontribusi cukup baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 30,28 %, sedangkan sektor Jasa-jasa cukup besar kontribusinya terhadap PDRB yaitu 22,02 %. Perkembangan dan kontribusi pada sektor ini bermakna cukup baik terhadap perekonomian daerah karena berkembangnya sektor pertanian memberikan makna banyak tenaga kerja yang terserap pada sektor ini dan gambaran kesejahteraan petani. Demikian pula besarnya kontribusi sektor angkutan/transportasi berarti perekonomian daerah berjalan lancar dan bermultiplier terhadap sektor lainnya. Perhatian yang sangat besar pada sektor ini, ternyata cukup sebanding dengan kontribusinya terhadap PDRB terlihat dari besarnya kenaikan aktual. Dalam hal ini perlu kajian mendalam tentang bagaimana mengembangkan sektor ini menjadi leading sektor karena sektor ini merupakan salah satu sektor andalan.

2. Keunggulan Daya Saing (Regional Share Growth) Sektor Ekonomi Daerah

Dari sumbangan persentase perubahan PDRB yang disebabkan pangsa wilayah/*Regional Share Growth* (RSG) yang bernilai positif yang berarti memiliki keunggulan daya saing adalah Sektor Pertanian (0,17 %), Sektor Listrik, Gas dan Air (0,94 %). Sedangkan sektor – sektor yang mengalami nilai negatif yang berarti tidak memiliki keunggulan daya saing adalah sektor Pertambangan 11,47 %, Keuangan 9,53 %, , konstruksi 5,64 %, Industri Pengolahan 3,94 %, Jasa-jasa 3,58 %, Perdagangan 4,37 % , Transportasi 1,36 %. Hal ini menunjukkan bahwa sektor yang memiliki keunggulan daya saing hanya sektor yang memiliki nilai RSG positif tersebut.

Tabel 4.3.
Keunggulan Komparataive Daya Saing

No.	Lapangan Kerja	Daya Saing	Efek Bersih
1	Pertanian	0.17	(1.66)
2	Pertambangan dan Penggalian	(11.47)	(6.86)
3	Industri Pengolahan	(3.94)	(9.24)
4	Listrik dan Air Bersih	0.94	(3.96)
5	Bangunan/Kontruksi	(5.64)	(3.31)
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	(4.37)	(5.29)
7	Pengangkutan dan Komunikasi	(1.36)	(3.99)
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	(9.53)	0.02
9	Jasa-jasa	(3.58)	(3.44)

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mengembangkan sektor yang memiliki keunggulan daya saing menjadi penting karena sektor inilah yang secara jangka panjang akan dapat menopang perekonomian daerah dan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB. Sehingga hasil perhitungan ini cukup layak untuk menjadi bahan pertimbangan. Sektor lainnya yang memiliki nilai negatif ini juga menjadi penting sebagai dasar dan pendukung sektor yang mempunyai daya saing ini sehingga sector ini harus dibenahi menjadi sector yang juga berdaya saing sehingga kontribusinya menjadi meningkat dalam PDRB dan Pendapatan Asli Daerah. Kurangnya tingkat keunggulan daerah memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing baik dalam bidang ekonomi maupun bidang non ekonomi lainnya. Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan potensi daerah sangat dipengaruhi oleh iklim dan perubahan kondisi alam yang terdiri dari daerah pegunungan, daerah lebak/bawah dan perkotaan dimana setiap daerah memiliki tingkat produktivitas ekonomi dan Sumber daya manusia yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara harus disesuaikan dengan potensi dan pola perilaku masyarakat di masing-masing daerah.

Pada tataran makro, terdapat 7 (tujuh) factor yang mempengaruhi lemahnya daya saing Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berakibat kurangnya tingkat keunggulan daerah, yaitu: (a) Kurang kondusifnya kondisi ekonomi makro; (b) Kualitas Sumber daya manusia yang masih rendah (c) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas (d) lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari tingkat produktivitasnya yang rendah, (e) pasar tenaga kerja yang belum optimal, (f) akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, dan (g) praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional.

Selanjutnya pemerintah daerah perlu membenahi ketujuh faktor yang mempengaruhi daya saing kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut. Langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing diantaranya :

1. Menciptakan kondisi ekonomi makro daerah yang kondusif melalui perbaikan pertumbuhan ekonomi melalui sektor basis yang dapat mendorong sektor lainnya dengan didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat melalui peran Dinas Disperindag dan Koperasi dalam memantau kegiatan ekonomi sektor riil dan menjaga peran mediasi perbankan dalam stabilisasi harga yang dapat menekan inflasi daerah, mendorong investasi di daerah dan kesempatan kerja.
2. Melakukan penyiapan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang siap pakai dan berkualitas pada bidang pekerjaan yang merupakan potensi ekonomi lokal seperti sektor pertanian, industri logam, industri makanan dan minuman, dan sektor lainnya sesuai kebutuhan.
3. Membuka akses dan meningkatkan penguasaan dan transpormasi teknologi tepat guna bagi berbagai keperluan.
4. Mendorong terciptanya efesiensi dan inovasi usaha dan kinerja SDM
5. Menggali dan peningkatan akses potensi keuangan daerah yang mendorong kemandirian daerah.
6. Mendorong terciptanya manejerial yang profesional dalam pelayanan masyarakat dan kegiatan usaha masyarakat dan meningkatkan kemampuan akses permodalan.

3. Efek Bersih (Pergeseran Bersih) Kemampuan Berkontribusi terhadap PDRB Propinsi

Pertumbuhan yang terjadi lebih banyak disebabkan komponen perubahan pertumbuhan propinsi, walaupun secara efek bersih/Pergeseran Bersih (PB) Wilayah Hulu Sungai Utara yang bernilai positif hanya sektor keuangan yaitu 0,02 % yang berarti sektor ini mampu berkontribusi terhadap PDRB Propinsi dan perkembangan wilayah. Pergeseran Bersih (PB) yang bernilai negatif seperti se %, industri 9,20 %, listrik, gas dan air 3,96 %, konstruksi 3,31 %, perdagangan 5,29 % angkutan 3,99 %, dan jasa 3,44 % yang berarti Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan supply (input) dari daerah lain di Kalimantan Selatan. Efek bersih yang bernilai positif pada sektor PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut menunjukkan kemampuan sektor ini dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB propinsi menjadi input bagi daerah lainnya, sedangkan yang negatif berarti merupakan kontribusi daerah lain atau input berasal daerah lainnya. Secara keseluruhan dari efek bersih ini besarnya sumbangan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap PDRB Propinsi Kalimantan Selatan sebesar minus 37,73 %. Angka ini menunjukkan bahwa secara makro tingkat propinsi peranan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup besar ketergantungannya bagi pertumbuhan dan pembangunan di daerah lainnya.

4. Sektor yang Berkembang Pesat

Sektor ekonomi yang memiliki *Industrial Mix Growth* (IMG) positif menunjukkan sektor ekonomi yang berkembang pesat, diantaranya sektor Pertambangan (4,61 %), Kontruksi (2,33 %), Keuangan (9,54 %) dan Jasa (0,14 %). Pesatnya perkembangan sektor ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang tepat agar lebih memberikan kontribusi dan menjadi leading sektor pembangunan daerah. Perkembangan sektor pertanian, listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan, keuangan dan jasa yang merupakan sektor basis pada daerah ini hanya pertanian dan jasa yang mengalami kenaikan. Sektor yang berkembang pesat ini adalah sektor yang dominan digeluti masyarakat dalam berusaha dan menyerap tenaga kerja sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

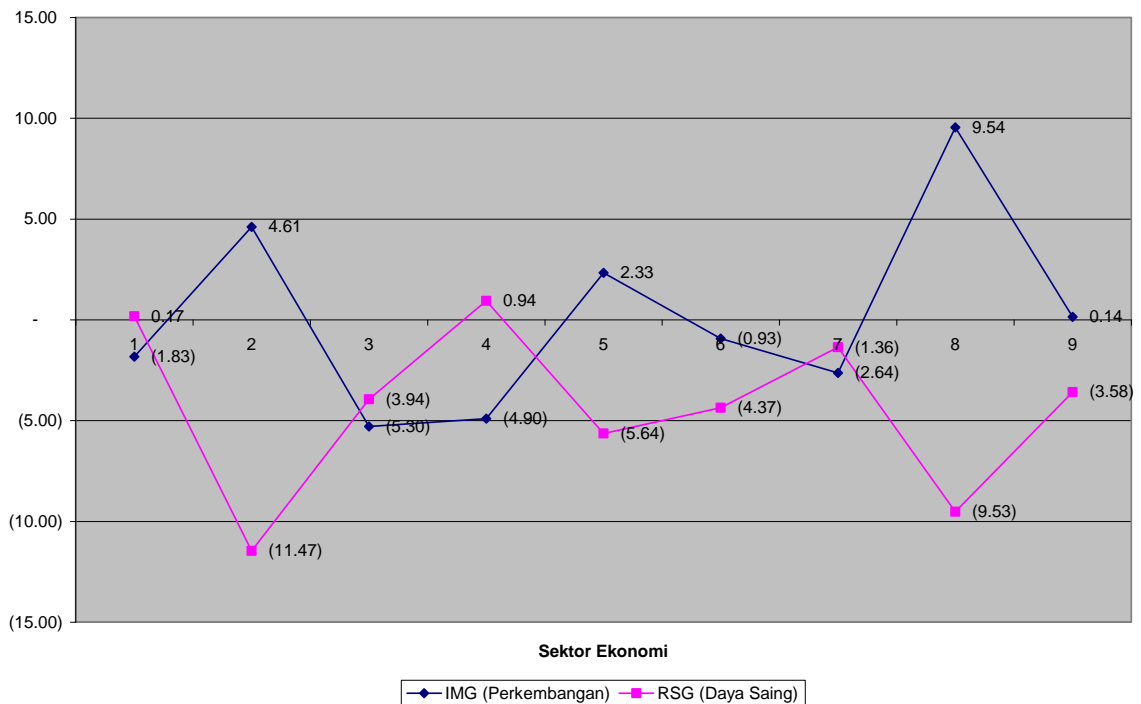
Sektor yang kurang berkembang dengan pesat karena memiliki IMG yang negatif dalam jangka waktu analisa dari tahun 2006-2008 sektor yang berkembang pesat dapat tergambar sehingga bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat merancang pembangunan pada sektor ini agar menjadi lebih optimal. Di sisi lain penting dalam mengembangkan sektor yang kurang pesat dengan melakukan evaluasi titik lemahnya untuk melakukan perbaikan.

Tabel 4.4.
Kombinasi Analisis LQ dan Shift Share Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sektor	LQ 2006	LQ 2008	IMG (Perkembangan)	RSG Daya Saing	Effek Bersih	Kenaikan Aktual	Rangking
1. Pertanian	1.3376	1.3855	(1.83)	0.17	(1.66)	11.79	2
2. Pertambgn & Penggalian	0.0010	0.0009	4.61	(11.47)	(6.86)	6.59	8
3. Industri Pengolahan	0.9360	0.9328	(5.30)	(3.94)	(9.24)	4.21	9
4. Listrik, Gas, dan Air	1.0463	1.0915	(4.90)	0.94	(3.96)	9.49	5
5. Kontruksi	1.1566	1.1379	2.33	(5.64)	(3.31)	10.14	3
6. Perdagangan	1.3063	1.2986	(0.93)	(4.37)	(5.29)	8.15	7
7. Angkutan/Transportasi	0.8151	0.8327	(2.64)	(1.36)	(3.99)	9.45	6
8. Lembaga Keuangan	1.0933	1.0432	9.54	(9.53)	0.02	13.46	1
9. Jasa-jasa	2.0758	2.0792	0.14	(3.58)	(3.44)	10.00	4

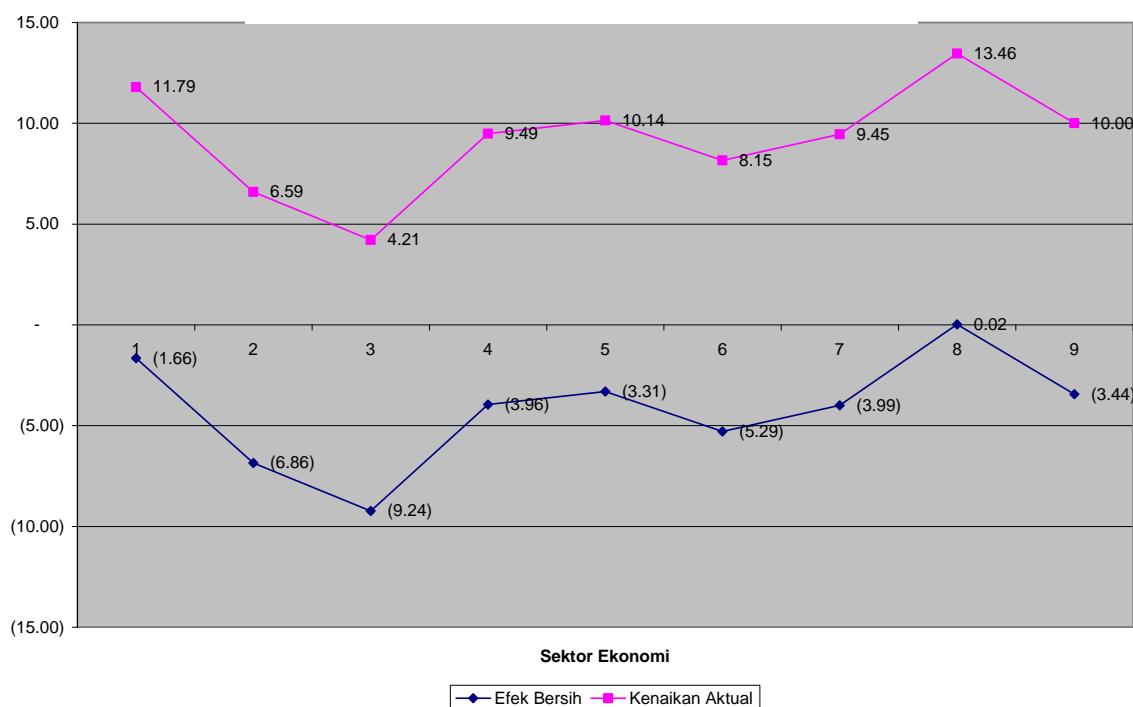
Sumber : PDRB Kabupaten HSU, 2006-2008 (BPS, 2009 diolah)

Gambar 4.1. Perkembangan dan Daya Saing Ekonomi



Analisis dan grafik di atas menggambarkan sektor industri yang merupakan sektor andalan Kabupaten Hulu Sungai Utara ternyata sektor yang kurang berkembang pesat namun belum mempunyai daya saing. Hal ini harus menjadi perhatian pihak terkait, karena sebagai sektor andalan yang banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi daerah sentra industri kayu & rotan dan industri rumah tangga (kerajinan/anyaman) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sektor perdagangan daerah ini juga sama dengan sector industri yaitu tidak berdaya saing dan tidak berkembang, hal ini ternyata disebabkan sector perdagangan pada banua lima (banua lima plus Balangan) lebih tersedot ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan pengamatan dan penelitian ke berbagai instansi terkait, masyarakat pelaku usaha dan konsumen hal ini terjadi akibat ada titik jenuh dalam inovasi produk, sumber daya manusia yang bergerak disektor ini masih rendah hal ini. Sektor yang menarik untuk dicermati adalah sektor konstruksi, sektor ini memiliki perkembangan cukup pesat di daerah ini namun masih belum berdaya saing. Sektor ini terlihat perkembangannya karena sektor ini membuka luasan kota ke arah pinggiran yang menyediakan lahan perumahan dan konstruksi yang lebih luas karena selama ini pembangunan pada sektor konstruksi agak lambat dibandingkan Kabupaten lainnya di Banua Enam seperti dengan Kabupaten HST dan Tabalong. Perkembangan yang sangat pesat pada sektor keuangan, hal ini menggambarkan perekonomian daerah ini sangat dinamis dan bergerak dengan baik sebab peredaran uang cukup tinggi yang diiringi dengan perkembangan sektor jasa yang positif, sehingga hanya sektor keuangan yang dapat memberikan efek kontribusi terhadap perekonomian provinsi Kalimantan Selatan. Yang menarik di kabupaten HSU ternyata semua sektor mengalami kenaikan aktual yang cukup merata semua sektor dan yang tertinggi sektor keuangan dan pertanian.

Gambar 4.2. Efek Bersih dan Kenaikan Aktual



4.2. Kondisi Ekonomi Makro Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Kecamatan Danau Panggang

Tabel 4.5. Analisis Shift Share dan LQ Kecamatan Danau Panggang

Sektor	IMG (Ri-Ra)	RSG (ri-Ri)	Efek		Rangking	LQ
			Bersih	Kenaikan Aktual		
1. Pertanian	(0.68)	3.65	2.97	7.55	2	4.8384
2. Pertambgn & Penggalian	(0.79)	-	-	-	0	0.0000
3. Industri Pengolahan	(1.96)	0.04	(1.91)	2.66	8	3.2108
4. Listrik, Gas, dan Air	(1.25)	0.10	(1.15)	3.43	6	2.7520
5. Kontruksi	1.56	(0.14)	1.42	6.00	4	2.2191
6. Perdag, Hotel & Restoran	(0.22)	2.12	1.90	6.48	3	4.1347
7. Angkutan/Transportasi	(0.21)	(1.08)	(1.28)	3.29	7	2.9418
8. Lembaga Keuangan	3.79	(0.06)	3.73	8.30	1	3.1338
9. Jasa-jasa	1.41	(0.36)	1.05	5.63	5	2.5784

Sumber : PDRB HSU 2006-2008 (Data diolah)

Berdasarkan perhitungan shift share tersebut diatas dapat dianalisa bahwa sektor ekonomi kecamatan Danau Panggang yang berkembang terjadi pada tiga sektor yaitu kontruksi, lembaga keuangan dan jasa-jasa, sedangkan sektor yang berdaya saing kuat pada sektor pertanian, industri, listrik, gas dan air, dan sektor perdagangan. Sektor ekonomi yang mempunyai efek positif berkontribusi terhadap PDRB kabupaten HSU adalah sektor pertanian, kontruksi, perdagangan, keuangan dan jasa. Berdasarkan analisa ini sektor yang memiliki nilai tertinggi dalam kenaikan actual merupakan akumulasi dari berbagai keunggulan adalah sektor keuangan, pertanian dan perdagangan. Dalam analisa LQ sektor yang merupakan ekonomi base pada kecamatan semuanya merata namun yang memiliki nilai LQ yang tertinggi yang berarti sektor ini menjadi economy base pada kecamatan ini adalah pertanian, perdagangan dan industri. Danau Panggang sebagai penghasil pertanian potensial terutama subsektor perikanan, peternakan (kerbau rawa) selian subsektor

tanaman pangan. Aktivitas perdagangan di kecamatan Danau Panggang cukup tinggi sebagai daerah pelabuhan sungai dan melayani kebutuhan masyarakat sekitar sampai ke kecamatan lainnya seperti kecamatan Paminggir dan ke Kalimantan Tengah terutama daerah Jinamas. Sedangkan sektor industri yang banyak didaerah ini berkaitan dengan industri kayu dan perahu. Pertumbuhan ekonomi kecamatan Danau Panggang sebesar 5,42 %.

2. Kecamatan Paminggir

Tabel 4.6. Analisis Shift Share dan LQ Kecamatan Paminggir

Sektor	IMG (Ri-Ra)	RSG (ri-Ri)	Effek	Kenaikan	Rangking	LQ
			Bersih	Aktual		2008
1. Pertanian	(0.68)	3.00	2.32	6.89	1	2.3636
2. Pertambgn & Penggalian	(0.79)	-	-	-	0	0.0000
3. Industri Pengolahan	(1.96)	0.11	(1.84)	2.73	6	2.4783
4. Listrik, Gas, dan Air	(1.25)	-	-	-	0	0.0000
5. Kontruksi	1.56	(0.13)	1.43	6.01	2	0.5116
6. Perdag, Hotel & Restoran	(0.22)	1.60	1.38	5.95	3	2.2085
7. Angkutan/Transportasi	(0.21)	(2.04)	(2.25)	2.32	7	0.6117
8. Lembaga Keuangan	3.79	(3.67)	0.12	4.69	5	1.1982
9. Jasa-jasa	1.41	(0.09)	1.32	5.90	4	1.4370

Sumber : PDRB HSU 2006-2008 (Data diolah)

Sektor ekonomi yang berkembang pesat di kecamatan Paminggir hanya sektor kontruksi, keuangan dan jasa sedangkan yang memiliki daya saing dengan daerah sekitarnya adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan. Sektor yang dapat menyumbang bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten HSU adalah sektor pertanian, kontruksi, perdagangan, keuangan dan jasa-jasa. Kenaikan actual yang dapat diandalkan sebagai sektor unggulan ternyata sektor pertanian dan kontruksi. Hal ini sesuai dengan keadaan fisik wilayah yang memiliki potensi pertanian yang luas dan subur sebagai daerah rawa sekaligus daerah yang baru berkembang dan dibangun sehingga sektor kontruksi berkembang pesat. Namun berdasarkan hasil perhitungan LQ sektor industri sebagai sektor yang menjadi basis ekonomi dan diikuti oleh pertanian. Pertumbuhan ekonomi di kecamatan Paminggir sebesar 4,93 %, pertumbuhan ini memang masih lebih rendah dibanding kecamatan Danau Panggang.

3. Kecamatan Babirik

Tabel 4.7. Analisis Shift Share dan LQ Kecamatan Babirik

Sektor	IMG (Ri-Ra)	RSG (ri-Ri)	Effek	Kenaikan	Rangking	LQ
			Bersih	Aktual		2008
1. Pertanian	(0.68)	(2.59)	(3.27)	1.30	8	4.7829
2. Pertambgn & Penggalian	(0.79)	-	-	-	0	0.0000
3. Industri Pengolahan	(1.96)	0.04	(1.91)	2.66	7	1.2796
4. Listrik, Gas, dan Air	(1.25)	0.10	(1.15)	3.43	4	2.7520
5. Kontruksi	1.56	(0.19)	1.37	5.94	1	1.0870
6. Perdag, Hotel & Restoran	(0.22)	(1.15)	(1.37)	3.20	5	2.8367
7. Angkutan/Transportasi	(0.21)	(1.52)	(1.73)	2.85	6	1.3275
8. Lembaga Keuangan	3.79	(3.62)	0.17	4.74	3	2.5124
9. Jasa-jasa	1.41	(0.12)	1.29	5.87	2	2.1042

Sumber : PDRB HSU 2006-2008 (Data diolah)

Kecamatan Babirik yang menjadi basis pertanian berdasarkan analisis LQ, dan menjadi lumbung padi kabupaten HSU ternyata sektor pertanian bukan sektor yang berkembang pesat. Sektor yang berkembang pesat didaerah ini adalah sektor kontruksi, jasa, dan keuangan, sementara itu sektor yang berdaya saing

didaerah ini adalah sektor industri, listrik, gas dan air. Sektor yang berefek menyumbang pertumbuhan kabupaten adalah sektor keuangan dan jasa. Sementara sektor yang mengalami kenaikan actual adalah sektor jasa dan konstruksi. Pertumbuhan ekonomi kecamatan Babirik sebesar 3,75 %, angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kecamatan Danau Panggang dan Paminggir.

4. Kecamatan Sungai Tabukan

Tabel 4.8. Analisis Shift Share dan LQ Kecamatan Sungai Tabukan

Sektor	IMG (Ri-Ra)	RSG (ri-Ri)	Effek	Kenaikan	Rangking	LQ
			Bersih	Aktual		2008
1. Pertanian	(0.68)	(0.54)	(1.22)	3.36	6	1.9758
2. Pertambgn & Penggalian	(0.79)	-	-	-	0	0.0000
3. Industri Pengolahan	(1.96)	0.04	(1.91)	2.66	7	4.6609
4. Listrik, Gas, dan Air	(1.25)	-	-	-	0	0.0000
5. Kontruksi	1.56	(0.21)	1.35	5.92	1	1.6624
6. Perdag, Hotel & Restoran	(0.22)	(0.66)	(0.88)	3.69	5	2.5412
7. Angkutan/Transportasi	(0.21)	0.31	0.10	4.68	4	1.5577
8. Lembaga Keuangan	3.79	(3.68)	0.11	4.68	3	1.1802
9. Jasa-jasa	1.41	(0.26)	1.15	5.73	2	1.5637

Sumber : PDRB HSU 2006-2008 (Data diolah)

Kecamatan Sungai Tabukan sebagai kecamatan baru pemekaran dari kecamatan Sungai Pandan berkembang pesat pada sektor keuangan, konstruksi dan jasa, sedangkan yang berdaya saing tinggi pada sektor industri dan transportasi. Efek yang dapat disumbangkan kecamatan ini pada kabupaten adalah sektor konstruksi, jasa, keuangan dan transportasi. Sementarai itu semua sektor di kecamatan Sungai Tabukan mengalami kenaikan actual yang cukup merata. Dengan sektor unggulan pada sektor konstruksi, jasa dan keuangan. Ekonomi base daerah ini ditopang oleh sektor industri, perdagangan, konstruksi dan jasa. Industri rumah tangga di kecamatan Sungai Tabukan cukup berkembang seperti anyaman, hasil perikanan, dsb. Pertumbuhan ekonomi kecamatan Sungai Tabukan sebesar 4,39 % masih lebih tinggi dibandingkan kecamatan Babirik namun dibawah kecamatan Danau Panggang.

5. Kecamatan Sungai Pandan

Tabel 4.9. Analisis Shift Share dan LQ Kecamatan Sungai Pandan

Sektor	IMG (Ri-Ra)	RSG (ri-Ri)	Effek	Kenaikan	Rangking	LQ
			Bersih	Aktual		2008
1. Pertanian	(0.68)	(0.21)	(0.89)	3.69	8	3.9157
2. Pertambgn & Penggalian	(0.79)	-	-	-	0	0.0000
3. Industri Pengolahan	(1.96)	(0.10)	(2.05)	2.52	7	5.1924
4. Listrik, Gas, dan Air	(1.25)	0.10	(1.15)	3.43	4	2.7520
5. Kontruksi	1.56	(0.21)	1.35	5.92	1	4.9873
6. Perdag, Hotel & Restoran	(0.22)	(0.48)	(0.71)	3.87	5	4.5447
7. Angkutan/Transportasi	(0.21)	0.77	0.56	5.14	6	3.9154
8. Lembaga Keuangan	3.79	(1.43)	2.36	6.93	3	5.0316
9. Jasa-jasa	1.41	(0.30)	1.11	5.68	2	4.2770

Sumber : PDRB HSU 2006-2008 (Data diolah)

Kecamatan Sungai Pandan sebagai kecamatan yang cukup terkenal dengan sebutan Alabio memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 4,65 % ternyata masih lebih tinggi kecamatan Danau Panggang. Sektor yang berkembang pesat didaerah ini adalah sektor keuangan, konstruksi, dan jasa terbukti dengan pesatnya perkembangan BPR yang ada di kecamatan ini. Sedangkan sektor yang berdaya saing adalah sektor transportasi dan listrik, gas dan air, hal sesuai karena daerah ini menjadi daerah transit (Muara Tapus) dan

pelabuhan dan sektor listrik, gas dan air berkembang karena daerah ini adalah daerah padat penduduk. Sektor yang memberikan kontribusi dan efek bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten adalah sektor keuangan, jasa, transportasi dan konstruksi. Kenaikan actual terjadi pada semua sektor artinya sektor ekonomi kecamatan Sungai Pandan merupakan sektor yang dinamis dengan sektor unggulan sektor konstruksi, jasa, keuangan dan listrik namun yang menjadi ekonomi base tertinggi dalam analisa LQ adalah industri, keuangan, dan perdagangan. Ekonomi base di kecamatan ini semua menunjukkan nilai yang cukup tinggi sehingga semua sektor menjadi sama besarnya dalam peran perkembangan daerah ini untuk menjadi andalan dan unggulan.

6. Kecamatan Amuntai Selatan

Tabel 4.10. Analisis Shift Share dan LQ Kecamatan Amuntai Selatan

Sektor	IMG (Ri-Ra)	RSG (ri-Ri)	Effek	Kenaikan	Rangking	LQ
			Bersih	Aktual		2008
1. Pertanian	(0.68)	0.02	(0.66)	3.91	5	5.2139
2. Pertambgn & Penggalian	(0.79)	-	-	-	0	0.0000
3. Industri Pengolahan	(1.96)	0.05	(1.91)	2.67	7	4.0705
4. Listrik, Gas, dan Air	(1.25)	-	-	-	0	0.0000
5. Kontruksi	1.56	(0.12)	1.44	6.02	2	4.3168
6. Perdag, Hotel & Restoran	(0.22)	0.26	0.03	4.61	4	4.4711
7. Angkutan/Transportasi	(0.21)	(1.01)	(1.22)	3.36	6	5.0436
8. Lembaga Keuangan	3.79	(1.09)	2.70	7.27	1	4.3269
9. Jasa-jasa	1.41	(0.14)	1.27	5.84	3	2.9450

Sumber : PDRB HSU 2006-2008 (Data diolah)

Sektor ekonomi yang berkembang pesat pada kecamatan ini adalah sektor keuangan, konstruksi dan jasa dengan sektor yang berdaya saing adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan. Sektor yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten adalah sektor keuangan, jasa, konstruksi dan perdagangan dan yang mengalami kenaikan actual semua sektor dengan sektor unggulan pada sektor keuangan, konstruksi dan jasa. Sektor konstruksi menjadi unggulan karena kawasan ini banyak dibangun perumahan, pengembangan dari kecamatan Amuntai Tengah. Berdasarkan nilai LQ semua sektor bisa diandalkan namun yang memiliki nilai tertinggi adalah sektor pertanian, transportasi dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 4,81 %.

7. Kecamatan Amuntai Tengah

Tabel 4.11. Analisis Shift Share dan LQ Kecamatan Amuntai Tengah

Sektor	IMG (Ri-Ra)	RSG (ri-Ri)	Effek	Kenaikan	Rangking	LQ
			Bersih	Aktual		2008
1. Pertanian	(0.68)	(3.15)	(3.82)	0.75	8	4.3268
2. Pertambgn & Penggalian	(0.79)	-	-	-	0	0.0000
3. Industri Pengolahan	(1.96)	0.09	(1.86)	2.71	7	4.0375
4. Listrik, Gas, dan Air	(1.25)	(0.03)	(1.28)	3.30	5	27.5609
5. Kontruksi	1.56	0.19	1.75	6.33	2	14.6557
6. Perdag, Hotel & Restoran	(0.22)	(1.10)	(1.32)	3.25	6	6.2963
7. Angkutan/Transportasi	(0.21)	0.15	(0.06)	4.51	4	14.5336
8. Lembaga Keuangan	3.79	2.10	5.89	10.47	1	11.5154
9. Jasa-jasa	1.41	0.12	1.53	6.11	3	13.7364

Sumber : PDRB HSU 2006-2008 (Data diolah)

Pertumbuhan ekonomi kecamatan Amuntai Tengah sebesar 4,68 % namun ekonomi base kecamatan ini memiliki nilai LQ yang sangat tinggi. Semua sektor dikecamatan ini unggul dan dapat diandalkan sebagai leading sektor dan sektor yang paling tinggi adalah sektor listrik, gas dan air, kemudian konstruksi, transportasi, jasa dan keuangan. Sektor yang berkembang pesat adalah sektor keuangan, jasa dan konstruksi sedangkan yang berdaya saing adalah sektor keuangan, konstruksi, transportasi, jasa dan industri. Sektor yang berkontribusi mendorong perekonomian kabupaten adalah sektor keuangan, konstruksi dan jasa. Semua sektor mengalami kenaikan actual namun yang paling diunggulkan adalah sektor keuangan, konstruksi, jasa dan angkutan.

8. Kecamatan Banjarang

Tabel 4.12. Analisis Shift Share dan LQ Kecamatan Banjarang

Sektor	IMG (Ri-Ra)	RSG (ri-Ri)	Effek	Kenaikan	Rangking	LQ
			Bersih	Aktual		2008
1. Pertanian	(0.68)	1.15	0.47	5.04	5	3.3667
2. Pertambgn & Penggalian	(0.79)	(0.00)	(0.79)	3.78	7	8.9541
3. Industri Pengolahan	(1.96)	0.23	(1.72)	2.85	8	2.2751
4. Listrik, Gas, dan Air	(1.25)	-	-	-	0	0.0000
5. Kontruksi	1.56	(0.05)	1.51	6.09	2	4.6246
6. Perdag, Hotel & Restoran	(0.22)	1.05	0.82	5.40	4	2.7020
7. Angkutan/Transportasi	(0.21)	1.77	1.57	6.14	1	2.1015
8. Lembaga Keuangan	3.79	(3.68)	0.11	4.69	6	2.1123
9. Jasa-jasa	1.41	(0.16)	1.25	5.82	3	2.1136

Sumber : PDRB HSU 2006-2008 (Data diolah)

Sektor perekonomian yang berkembang pesat di kecamatan Banjarang adalah sektor keuangan, jasa dan konstruksi, sedangkan yang berdaya saing kuat adalah sektor transportasi, pertanian dan perdagangan. Sektor ekonomi yang berefek positif dalam berkontribusi terhadap perekonomian kabupaten adalah sektor transportasi, konstruksi, jasa, perdagangan, pertanian dan keuangan. Semua sektor mengalami kenaikan actual dengan rangking sektor unggulan pada sektor transportasi, konstruksi dan jasa. Semua sektor berpotensi sebagai sektor basis kecuali sektor listrik, gas dan air. Pertumbuhan ekonomi kecamatan Banjarang mencapai 4,98 %.

9. Kecamatan Amuntai Utara

Tabel 4.13. Analisis Shift Share dan LQ Kecamatan Amuntai Utara

Sektor	IMG (Ri-Ra)	RSG (ri-Ri)	Effek	Kenaikan	Rangking	LQ
			Bersih	Aktual		2008
1. Pertanian	(0.68)	0.33	(0.34)	4.23	6	3.3957
2. Pertambgn & Penggalian	(0.79)	0.00	(0.79)	3.79	7	26.8624
3. Industri Pengolahan	(1.96)	(0.21)	(2.16)	2.41	8	3.4680
4. Listrik, Gas, dan Air	(1.25)	-	-	-	0	0.0000
5. Kontruksi	1.56	(0.07)	1.49	6.06	2	1.4135
6. Perdag, Hotel & Restoran	(0.22)	(0.06)	(0.28)	4.29	5	3.4377
7. Angkutan/Transportasi	(0.21)	0.66	0.45	5.02	3	3.0753
8. Lembaga Keuangan	3.79	(3.67)	0.12	4.69	4	4.5340
9. Jasa-jasa	1.41	0.67	2.08	6.65	1	3.3882

Sumber : PDRB HSU 2006-2008 (Data diolah)

Pertumbuhan ekonomi kecamatan Amuntai Utara sebesar 4,64 % dengan sektor yang berkembang pesat pada sektor keuangan, konstruksi dan jasa dan yang berdaya saing adalah sektor jasa, transportasi dan

pertanian. Sektor yang berefek bersih pada perekonomian kabupaten adalah sektor jasa, konstruksi, transportasi dan keuangan. Semua sektor mengalami kenaikan actual dengan unggulan pada sektor jasa, konstruksi dan transportasi. Sektor basis pada kecamatan Amuntai Utara adalah semuanya punya dapat dijadikan sektor basis. Dan kecamatan ini mendominasi sumbangan pada sektor pertambangan galian C di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

10. Kecamatan Haur Gading

Tabel 4.14. Analisis Shift Share dan LQ Kecamatan Haur Gading

Sektor	IMG (Ri-Ra)	RSG (ri-Ri)	Effek	Kenaikan	Rangking	LQ
			Bersih	Aktual		2008
1. Pertanian	(0.68)	(0.20)	(0.88)	3.69	6	1.6376
2. Pertambgn & Peggalian	(0.79)	-	-	-	0	0.0000
3. Industri Pengolahan	(1.96)	(0.10)	(2.06)	2.51	7	5.1439
4. Listrik, Gas, dan Air	(1.25)	-	-	-	0	0.0000
5. Kontruksi	1.56	(0.06)	1.49	6.07	1	0.3390
6. Perdag, Hotel & Restoran	(0.22)	(0.63)	(0.85)	3.72	5	2.6442
7. Angkutan/Transportasi	(0.21)	0.57	0.36	4.94	3	0.7089
8. Lembaga Keuangan	3.79	(3.65)	0.14	4.71	4	0.2721
9. Jasa-jasa	1.41	(0.09)	1.32	5.90	2	1.6734

Sumber : PDRB HSU 2006-2008 (Data diolah)

Kecamatan Haur Gading sebagai kecamatan baru pemekaran pertumbuhannya sudah mencapai 4,51 % hampir sama dengan kecamatan induk yaitu kecamatan Amuntai Utara. Sektor ekonomi yang berkembang pesat di daerah ini adalah sektor keuangan, jasa dan konstruksi sedangkan yang berdaya saing adalah sektor transportasi. Efek bersih terhadap perekonomian daerah disumbang oleh sektor konstruksi, jasa, transportasi dan keuangan. Semua sektor mengalami kenaikan actual dengan sektor yang unggulan konstruksi, jasa dan transportasi sedangkan sektor basis adalah industri, perdagangan, jasa, dan pertanian. Sektor lainnya seperti konstruksi, transportasi, dan keuangan belum dapat dijadikan sektor basis.

BAB VII PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan telah terjadi ada titik jenuh dalam inovasi produk, sumber daya manusia yang bergerak disektor industri masih rendah. Sektor yang menarik untuk dicermati adalah sektor konstruksi, sektor ini memiliki perkembangan cukup pesat di daerah ini namun masih belum berdaya saing. Sektor ini terlihat perkembangannya karena sektor ini membuka luasan kota ke arah pinggiran yang menyediakan lahan perumahan dan konstruksi yang lebih luas karena selama ini pembangunan pada sektor konstruksi agak lambat dibandingkan Kabupaten lainnya di Benua Enam seperti dengan Kabupaten HST dan Tabalong. Perkembangan yang sangat pesat pada sektor keuangan, hal ini menggambarkan perekonomian daerah ini sangat dinamis dan bergerak dengan baik sebab peredaran uang cukup tinggi yang diiringi dengan perkembangan sektor jasa yang positif, sehingga hanya sektor keuangan yang dapat memberikan efek kontribusi terhadap perekonomian provinsi Kalimantan Selatan. Yang menarik di kabupaten HSU ternyata semua sektor mengalami kenaikan aktual yang cukup merata semua sektor dan yang tertinggi sektor keuangan dan pertanian.

1. Kenaikan aktual merupakan pertumbuhan kontribusi sector ini terhadap perekonomian daerah yang paling tinggi adalah sektor Lembaga Keuangan sebesar 13,46 %, sektor Pertanian 11,79 %, sektor Kontruksi 10,14 %, sektor Jasa-jasa sebesar 10 % kemudian disusul sektor Listrik dan Air 9,49 %, sektor pengangkutan 9,45 %, sektor %, sektor perdagangan 8,15 %, sektor pertambangan 6,59 %, sektor industri 4,21 %.
2. Dari sumbangan persentase perubahan PDRB yang disebabkan pangsa wilayah/*Regional Share Growth* (RSG) yang bernilai positif yang berarti memiliki keunggulan daya saing adalah Sektor Pertanian (0,17 %), Sektor Listrik, Gas dan Air (0,94 %).
3. Pertumbuhan yang terjadi lebih banyak disebabkan komponen perubahan pertumbuhan propinsi, walaupun secara efek bersih/Pergeseran Bersih (PB) Wilayah Hulu Sungai Utara yang bernilai positif hanya sektor keuanga yaitu 0,02 % yang berarti sektor ini mampu berkontribusi terhadap PDRB Propinsi dan perkembangan wilayah. Pergeseran Bersih (PB) yang bernilai negatif seperti se %, industri 9,20 %, listrik, gas dan air 3,96 %, kontruksi 3,31 %, perdagangan 5,29 % angkutan 3,99 %, dan jasa 3,44 % yang berarti Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan supply (input) dari daerah lain di Kalimantan Selatan.
4. Sektor ekonomi yang memiliki *Industrial Mix Growth* (IMG) positif menunjukkan sektor ekonomi yang berkembang pesat, diantaranya sektor Pertambangan (4,61 %), Kontruksi (2,33 %), Keuangan (9,54 %) dan Jasa (0,1

5.2. Rekomendasi

1. Peningkatan Infrastruktur, SDM, Produktivitas, dan kualitas komoditi pada sektor Pertanian
2. Optimalisasi fungsi Fasilitas Pasar yang merupakan infrastruktur pasar dimana tidak hanya merupakan tempat melakukan transaksi jual beli, namun juga merupakan sarana menyelenggarakan berbagai bentuk interaksi pelaku bisnis. Pasar rekomendasi akan melahirkan suatu system transit dalam segala bisnis yang berperan dalam proses usaha dengan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak terkait.
3. Revitalisasi pengembangan teknologi tepat guna dalam kegiatan industri kecil dan menengah dengan melalui :
 - Kegiatan industri lebih mengutamakan penggunaan teknologi dalam menghasilkan produk
 - Bahan baku yang memadai
 - Sarana dan prasarana yang lengkap, meliputi tempat atau bengkel yang representative dan mesin-mesin yang mendukung.
 - Pengrajin memiliki keterampilan dalam mengoperasikan alat bantu mesin secara baik dan efisien
 - Mempunyai lingkungan kerja yang kondusif antar kelompok pengrajin dalam memanfaatkan sarana dan prasarana UPT.
3. Peningkatan daya saing tenaga kerja daerah melalui :
 - a. Dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja perlu ditingkatkan bimbingan, pelatihan keterampilan, tata krama dan disiplin kerja serta peningkatan ilmu pengetahuan lainnya. Upaya ini

akan tercapai dengan kerjasama yang baik antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah.

- b. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah harus memfasilitasi peningkatan pendidikan agar dapat menghasilkan tenaga kerja siap pakai, mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Kantor Latihan Kerja (KLK), mengoptimalkan pendidikan bersubsidi dan beasiswa untuk masyarakat miskin. Untuk mengoptimalkan BLK dan KLK sangat perlu penambahan alat-alat latihan yang sesuai dengan kondisi riil sekarang. Hasil penelitian di daerah alat-alat yang dimilikinya sangat ketinggalan, sehingga sangat sulit untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja daerahnya.
- c. Perlu dilakukan kerjasama tenaga kerja untuk dilatih pada pusat-pusat latihan dengan berbagai daerah lain yang difasilitasi pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
- d. Perlu adanya perencanaan tenaga kerja yang baik dan berkoordinasi dengan sektor-sektor ekonomi lainnya sehingga tenaga kerja lokal yang dibutuhkan dan dilatih lebih dulu, kemudian berapa tenaga kerja dari luar daerah yang diperlukan direncanakan secara baik.
- e. Perlu diteliti lebih mendalam tentang produktivitas tenaga kerja lokal yang masih rendah dan loyalitasnya sedang yang menyebabkan tenaga kerja lokal kalah bersaing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L., 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2004, *RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006-2010*
- Bank Indonesia Banjarmasin, 2007, *Penelitian Pengembangan Komoditas Unggulan UMKM di Kalimantan Selatan*, LPPM IPB Bogor
- BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2007. *Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka Tahun 2007*, 2000-2006, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai Utara*
- Broadway, R.W. 1978. *Public Sector Economics*. Little, Brown and Company, Boston.
- Rosen, H. 1999. *Public Economics*. Fifth Edition. Irwin McGraw-Hill. Boston.
- Cullis, J. dan Jones, P., 1992. *Public Finance Public Choice Analytical Perspective*. McGraw-Hill. London.
- Fauzannor, A, 2008, *Analisis Penetapan SWP III Benua Lima Propinsi Kalimantan Selatan*, MEP FE Unlam
- Mangkoesebroto, G. 1991. *Ekonomi Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Matsui, K., dan Mudrajad, K. 2003. *Peran Pemerintah Daerah di Indonesia: Sebuah Survey Pembangunan Terkini*. Penelitian didanai JICA. Tidak dipublikasikan
- Kuncoro, M., 2001. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Miller, R.E. dan Blair, P.D. 1985. *Input-Output Analysis: Foundation and Extention*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Hubungan Pusat dan Daerah*.
- Saleh, M; Rusmin N; Yunani A; 2007. *Angkatan Kerja Kalimantan Selatan (Pengembangan Model Supply Demand Tenaga Kerja*. Balitbangda, Banjarmasin
- Solihin, D. dan Mahayudi, P. 2002. *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*. Penerbit ISMEE. Jakarta.
- Supamoko, 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.